

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kejahatan penyelundupan manusia yang merupakan bentuk kejahatan transnasional dengan kompleksitas tinggi dan dampak global yang serius. Sebagai negara dengan posisi geografis strategis, Indonesia menjadi salah satu jalur masuk utama, khususnya bagi etnis Rohingya melalui wilayah Aceh. Penelitian ini belakang masalah, urgensi penelitian, rumusan masalah, serta tujuan penelitian yang berfokus pada evaluasi implementasi Konvensi Palermo Tahun 2000 dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik *people smuggling* di Indonesia.

Penelitian ini menguraikan tinjauan teoritis dan kerangka hukum yang digunakan, dengan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Pembahasan juga mencakup pengaturan hukum internasional dalam Konvensi Palermo serta regulasi nasional yang telah diadopsi Indonesia pasca-ratifikasi. Pada bagian ini juga dianalisis kesesuaian norma hukum nasional dengan standar internasional, serta bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dalam konteks penyelundupan manusia, khususnya terkait migran Rohingya di Aceh.

Penelitian ini berisi hasil penelitian dan analisis kasus penyelundupan 137 orang Rohingya pada tahun 2023 yang menunjukkan kelemahan signifikan, antara lain lemahnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya efektivitas penegakan hukum, dan belum optimalnya perlindungan korban. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi Konvensi Palermo ke dalam sistem hukum nasional, hambatan regulatif dan kelembagaan masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama internasional agar pencegahan dan penanggulangan penyelundupan manusia dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Penyelundupan, Palermo, Transnasional, Aceh.

ABSTRACT

This research is motivated by the rise in human smuggling, a form of transnational crime with high complexity and serious global impact. As a country with a strategic geographic location, Indonesia is a major entry point, particularly for the Rohingya ethnic group through the Aceh region. This research examines the background, urgency, problem formulation, and objectives of the study, focusing on evaluating the implementation of the 2000 Palermo Convention in preventing and enforcing the law against people smuggling in Indonesia.

This research outlines the theoretical review and legal framework used, using normative juridical research methods and a descriptive-analytical approach through literature review. The discussion also covers the international legal provisions of the Palermo Convention and the national regulations adopted by Indonesia after its ratification. This section also analyzes the conformity of national legal norms with international standards, as well as how these regulations are implemented in the context of human smuggling, particularly regarding Rohingya migrants in Aceh.

This study presents the results of research and analysis of the smuggling of 137 Rohingya people in 2023, which demonstrates significant weaknesses, including weak inter-agency coordination, limited effective law enforcement, and suboptimal victim protection. The study's conclusions confirm that although Indonesia has adopted the Palermo Convention into its national legal system, regulatory and institutional barriers remain major challenges. Therefore, regulatory reform, increased capacity of law enforcement officials, and strengthened international cooperation are needed to prevent and combat human smuggling in a comprehensive and sustainable manner.

Keywords: *Smuggling, Palermo, Transnational, Aceh*